

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011 - 2016**

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI I : MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR UMUM SECARA MERATA DAN BERKEADILAN				
1. Perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi	Panjang Jalan Kabupaten	Jumlah panjang jalan kabupaten	Primer	Dinas PU
	Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Primer	Dinas PU
	Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	Persentase jalan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	Primer	Dinas PU
	Meningkatnya Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	Perhubungan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil	Primer	Dishubkominfo
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah orang yang menggunakan jasa angkutan umum	Primer	Dishubkominfo
	Jumlah pelabuhan udara, laut dan terminal bus	cukup jelas	Primer	Dishubkominfo
	Jumlah angkutan darat	Jumlah angkutan umum yang beroperasi	Primer	Dishubkominfo
	Pemasangan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu yang dipasang pada tahun bersangkutan	Primer	Dishubkominfo
	Jalan desa dilalui roda empat	Jumlah jalan pedesaan yang dapat dilalui kendaraan roda empat	Primer	Dinas PU
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Perbandingan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan sehingga dapat diketahui tingkat kepadatan kendaraan	Primer	Dinas PU dan Dishubkominfo
	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	Panjang jalan yang menjadi jalan penghubung ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	Primer	Dinas PU
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Panjang turap yang dibangun di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Primer	Dinas PU
	Revitalisasi Sungai dan transportasi sungai dan laut	Persentase revitalisasi Sungai	Primer	Dishubkominfo
	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut	cukup jelas	Primer	Dishubkominfo
	Meningkatnya pangsa pengguna modal transportasi sungai dan laut	Jumlah pengguna moda transportasi	Primer	Dishubkominfo
2. Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di pedesaan	Jumlah PLTS di pedesaan	Primer	Dinas ESDM
	Peningkatan rasio elektrifikasi	Perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan total penduduk	Primer	Dinas ESDM
	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	Persentase jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih	Sekunder	Dinas PU
3. Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	Persentase jumlah infrastruktur irigasi terhadap irigasi yang ada	Primer	Dinas PU, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun
	Luas irigasi dalam kondisi baik	Persentase luas irigasi yang baik terhadap irigasi yang ada	Primer	Dinas PU, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun
	Tersedianya infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	cukup jelas	Primer	Dinas PU, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun, DKP
4. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)	Transportasi dua arah yang efektif	cukup jelas	Primer	Dinas PU dan Dishubkominfo
5. Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik	Peningkatan pembangkit listrik tenaga surya di pedesaan	Jumlah PLTS di pedesaan	Primer	Dinas ESDM
	Peningkatan jaringan telekomunikasi	Persentase penduduk yang mempunyai telepon tetap dan Telepon seluler	Sekunder	Dishubkominfo
6. Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.	Perizinan satu pintu	Jumlah instansi perizinan terpadu	Primer	KPPT
	adanya kemudahan berinvestasi	Kemudahan berinvestasi melalui jumlah jenis perizinan yang ada	Primer	KPPT
	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi strategis	Tersedianya dokumen pendukung	Primer	Bappeda
7. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persentase RTH per satuan luas wilayah	Primer	Dinas PU dan Dinas Tata Kota
	Persentase rumah layak huni	Persentase rumah yang layak huni terhadap total rumah	Primer	Dinas PU
	Persentase peningkatan rumah sehat	Persentase rumah yang sehat terhadap total rumah	Primer	Dinas PU
	Rasio pemukiman layak huni	Persentase pemukiman yang layak huni terhadap total pemukiman yang ada	Primer	Dinas PU
	Akses sanitasi layak	Persentase rumah yang bersanitasi layak	Sekunder	Dinas PU
	Persentase penanganan sampah	Persentase penanganan sampah yang dapat ditangani	Primer	Dinas Tata Kota
	Adanya pola kemitraan dengan Swasta	Jumlah kemitraan swasta	Sekunder	Dinas PU

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL TERAMPIL DAN SIAP PAKAI (PENDIDIKAN GRATIS BERKUALITAS)					
1.	Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)	Angka Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Angka melek huruf	Persentase jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang bisa menulis terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun keatas	Sekunder	Dinas Pendidikan
		APK SD/Sederajat	Persentase jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SD/ sederajat	Sekunder	Dinas Pendidikan
		APK SMP/Sederajat	Persentase jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SMP/ sederajat terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SMP/ sederajat	Sekunder	Dinas Pendidikan
		APK SMA/Sederajat	Persentase jumlah penduduk berbagai usia sedang sekolah pada jenjang SMA/ sederajat terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia pada jenjang SMA/ sederajat	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya APM PAUD	Persentase jumlah penduduk usia dibawah 7 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/ Sederajat	Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	Sekunder	Dinas Pendidikan
		APM SMP/ Sederajat	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	Sekunder	Dinas Pendidikan
		APM SMA/ Sederajat	Persentase jumlah penduduk usia 16-18 tahun terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tersebut	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar (%)	Perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan dasar	Jumlah sekolah SD sederajat dibagi jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia 7-12 tahun dikali 10.000	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan dasar	Jumlah guru SD sederajat dibagi jumlah murid SD sederajat dikali 10.000	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan dasar (unit)	Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah (%)	Perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan tingkat usia dini (PAUD)	Jumlah sekolah tingkat PAUD	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk sekolah tingkat pendidikan menengah	Jumlah sekolah SMP sederajat dibagi jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia 13-15 tahun dikali 10.000	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah	Jumlah guru SMP sederajat dibagi jumlah murid SMP sederajat dikali 10.000	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Sarana pendidikan tingkat pendidikan menengah (unit)	Jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah	Sekunder	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil (90% sampai tahun 2016)	Persentase tingkat kemampuan dan kesejahteraan guru daerah terpencil	Primer	Dinas Pendidikan
		Terbentuknya perda tentang system pelayanan pendidikan	Perda Pendidikan gratis berkualitas	Primer	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya kualitas lulusan SMU/SMK/ sederajat	Persentase kuliatas lulusan SMU/ sederajat	Primer	Dinas Pendidikan
		Berdirinya perguruan tinggi	Cukup jelas	Primer	Dinas Pendidikan
		Jumlah perpustakaan (unit)	Cukup jelas	Primer	Kantor Perpustakaan dan Arip
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Cukup jelas	Primer	Kantor Perpustakaan dan Arip
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	Jumlah unit buku di perpustakaan	Primer	Kantor Perpustakaan dan Arip
		Penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	Persentase Penyandang cacat mendapat akses mengikuti pendidikan	Primer	Dinas Pendidikan dan Dinsosnakertrans
2.	Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja	Berfungsinya BLK	Terselenggaranya pendidikan di BLK	Primer	Dinsosnakertrans dan Dinas Pendidikan
MISI III : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DENGAN PENEMPATAN SDM PROFESIONAL					
1.	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	Persentase pejabat yang memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bidang tugasnya dibandingkan dengan total jabatan yang ada	Primer	Sekda, BKD
		Jumlah PNS Daerah	cukup jelas	Primer	BKD
		Meningkatnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan	Persentase tindakan lanjut hasil pengawasan	Primer	Inspektorat, Sekda
		Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas intern	Persentase jumlah aparatur pengawas intern	Primer	Inspektorat
		Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	cukup jelas	Primer	Kantor Satpol PP

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	Meningkatnya pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	Pelaksanaan sistem keuangan daerah yang transparan berbasis e-budget dan e-audit	Primer	DPKAD
3. Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan	Wilayah daerah tertata sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak-pihak berkepentingan	Terlaksananya penataan wilayah	Primer	Sekda, BPMPD/K, Bappeda
	Penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan meningkat	Pelayanan publik di kecamatan	Primer	Sekda, BPMPDK, kecamatan
4. Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.	Adanya Prioritas Calon CPNS	Jumlah Prioritas calon CPNS sesuai kebutuhan	Primer	BKD, SKPD Terkait
	Penempatan CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD	Penempatan CPNS yang sesuai dengan kebutuhan		
	CPNS yang bebas KKN	Terlaksana CPNS bebas KKN	Primer	BKD, Sekda
5. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat-sangat terpencil – sangat terpencil - tidak terpencil)	Cukup jelas	Primer	BKD
6. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).	Insentif Pegawai SARA meningkat	Terealisasi insentif pegawai SARA meningkat	Primer	Sekda, DPKAD
	Penghargaan bagi Pegawai SARA	Cukup jelas	Primer	Sekda, DPKAD
7. Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN	Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah	adanya Perda	Primer	Sekda, DPKAD
	KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik	Optimalnya fungsi KPPT	Primer	KPPT
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan terpadu	Persentase peningkatan PAD	Primer	KPPT, DPKAD
	Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	e-KTP terlaksana dengan optimal	Primer	Dinas Dukcapil
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persentase penduduk yang memiliki KTP	Primer	Dinas Dukcapil
	Rasio pasangan berakte nikah	Persentase pasangan yang memiliki akte nikah	Primer	Dinas Dukcapil
	Kepemilikan akte kelahiran	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	Primer	Dinas Dukcapil
	Laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk per tahun	Primer	BPPKB, Dinas Dukcapil, SKPD terkait
	Pengembangan sistem jaringan e-government	Kapasitas Jaringan	Primer	Bappeda, KPDPAD
	Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi	Terinegrasinya sistem aplikasi	Primer	Bappeda, KPDPAD
	Sistem informasi daerah berbasis website	Layanan website sebagai informasi	Primer	Semua SKPD
	Pelayanan publik bebas dari KKN	Terlaksananya pelayanan publik bebas KKN	Primer	Inspektorat, Sekda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, KPPT, Dukcapil
MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN SEKTOR JASA LAINNYA.				
1. Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.	Jumlah izin Pelayanan satu pintu	jenis perizinan	Primer	KPPT
	Nilai Investasi PMA dan PMDN (US\$)	cukup jelas	Sekunder	KPPT, Bappeda
2. Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.	Nilai Ekspor (US\$)	cukup jelas	Sekunder	Disperindag
	Nilai Impor (US\$)	cukup jelas	Sekunder	Disperindag
	Laju inflasi	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS
	PDRB atas harga berlaku	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS
	Pertumbuhan PDRB	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS
	PDRB per kapita (Rp.juta)	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS
	Jenis dan jumlah bank	cukup jelas	Sekunder	Sekda, BPS
	Jumlah Penduduk (jiwa)	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS
	Jumlah Sentra industri kecil	cukup jelas	Sekunder	Disperindag
3. Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD	cukup jelas	Sekunder	Sekretariat Daerah
	Kantaya LKPM	cukup jelas	Sekunder	Sekretariat Daerah
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.	Tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Sekunder	Bappeda, BPS, SKPD terkait
	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	cukup jelas	Sekunder	Bappeda, BPS, SKPD terkait
	Lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan	Primer	Kantor Ketahanan Pangan
	desa ketahanan pangan	Jumlah desa ketahanan pangan	Primer	Kantor Ketahanan Pangan
	Lembaga distribusi pangan masyarakat	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat	Primer	Kantor Ketahanan Pangan
	Jumlah Desa Rawan Pangan	cukup jelas	Primer	Kantor Ketahanan Pangan
	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	cukup jelas	Primer	Kantor Ketahanan Pangan
	Konsumsi beras (kg/kap/thn)	cukup jelas	Primer	Kantor Ketahanan Pangan
	Jumlah UKM	cukup jelas	Primer	Dinas Koperasi UMKM
	Jumlah/UKM yang berperan	cukup jelas	Primer	Dinas Koperasi UMKM
	Jumlah Wirausaha baru berbasis teknologi	cukup jelas	Primer	Dinas Koperasi UMKM
	UKM Unggulan	cukup jelas	Primer	Dinas Koperasi UMKM
	Jumlah koperasi handal	cukup jelas	Primer	Dinas Koperasi UMKM
	Persentase koperasi aktif	Persentase Jumlah koperasi yang aktif (RAT)	Primer	Dinas Koperasi UMKM
	Produk Unggulan	Jumlah Produk unggulan	Primer	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun, Dinas Peternakan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UMKM, DKP

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
5. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.	Jumlah TK yang terserap	Cukup jelas	Sekunder	Dinas Sosnakertrans
	UMR	Jumlah upah yang minimal diterima oleh pekerja setiap bulannya	Sekunder	Dinas Sosnakertrans
	Jumlah Pelatihan	Jumlah pelatihan ketenagakerjaan	Primer	Dinas Sosnakertrans
	Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	Cukup jelas	Sekunder	Dinas Sosnakertrans
	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Cukup jelas	Sekunder	Dinas Sosnakertrans
	Angka kesempatan kerja	Adanya lapangan pekerjaan	Sekunder	Dinas Sosnakertrans
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Cukup jelas	Sekunder	BPPKB
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Cukup jelas	Sekunder	BPPKB
	Partisipasi angkatan kerja wanita	Cukup jelas	Sekunder	BPPKB
6. Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi	ketersediaan biro jasa perjalanan wisata untuk paket wisata di Tanjab. Timur	Jumlah birowisata yang menyediakan paket wisata di Tanjung Jabung Timur	Sekunder	Dinas Budparpora
	Keterpaduan sistem jaringan modal transportasi untuk pelayanan kepariwisataan	Sinergis sarana modal transportasi untuk layanan kepariwisataan	Sekunder	Dinas Budparpora
	keterpaduan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah	Wisata bahari, wisata budaya dan religi, Wisata Alam	Sekunder	Dinas Budparpora
	Meningkatnya kunjungan wisata 25%	Persentase peningkatan jumlah wisatawan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Sekunder	Dinas Budparpora
	Kunjungan wisata (orang)	Jumlah wisatawan (orang) yang berkunjung	Sekunder	Dinas Budparpora
	Sarana wisata (hotel & restoran)	Jumlah sarana hotel dan restoran	Sekunder	Dinas Budparpora
	Objek Wisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola	Sekunder	Dinas Budparpora
7. Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga	Potensi Lahan	Luas potensi lahan	Primer	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Hutbun
	Luas lahan pertanian tanaman pangan	Cukup jelas	Primer	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BP4K
	Pemberian bantuan, fasilitas, subsidi dll	Luas lahan yang mendapat bantuan	Primer	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BP4K
	Penguatan Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani	Primer	BP4K
	Nilai Tukar Petani (%)	Persentase nilai jual terhadap nilai produksi petani		Dinas Pertanian TP, Dinas Hutbun
	Produktivitas Padi	cukup jelas	Primer	Dinas Pertanian TP
	Produksi kedelai	cukup jelas	Primer	Dinas Pertanian TP
	Produksi karet	cukup jelas	Primer	Dinas Hutbun
	Produktivitas kelapa sawit	cukup jelas	Primer	Dinas Hutbun
	Produktivitas kopi	cukup jelas	Primer	Dinas Hutbun
	Produksi Padi	cukup jelas	Primer	Dinas Pertanian TP
	Produksi Jagung	cukup jelas	Primer	Dinas Pertanian TP
	Jumlah Sapi (ekor)	cukup jelas	Primer	Dinas Peternakan
	Jumlah Kambing (ekor)	cukup jelas	Primer	Dinas Peternakan
	Jumlah kerbau (ekor)	cukup jelas	Primer	Dinas Peternakan
	Jumlah domba (ekor)	cukup jelas	Primer	Dinas Peternakan
	Produksi daging ruminansia besar	cukup jelas	Primer	Dinas Peternakan
	Lembaga ekonomi mikro	Jumlah lembaga ekonomi mikro	Primer	Dinas Koperasi UMKM
	Jumlah industri pengolahan hasil pertanian	cukup jelas	Sekunder	Dinas Perindag; Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	Terpenuhi sarana prasarana pertanian	Jumlah sarana prasarana pertanian	Primer	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	Pencegahan penularan penyakit ternak	Penanganan penyakit ternak dengan baik	Primer	Dinas Peternakan
	fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	Pasar hewan	Primer	Dinas Peternakan
	Ikan Laut (ton)	Jumlah produksi ikan laut	Primer	DKP
	Ikan Perairan Umum (ton)	Jumlah produksi ikan perairan umum	Primer	DKP
	Ikan Kolam (ton)	Jumlah produksi ikan kolam	Primer	DKP
8. Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Peraturan tentang pengelolaan SDA	Adanya perda tentang pengelolaan SDA	Primer	Dinas ESDM
	Jumlah penyuluhan untuk kesadaran	Jumlah penyuluhan tentang lingkungan	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
	Tingkat pencemaran lingkungan	Jumlah kasus pencemaran lingkungan	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
	Kerusakan lingkungan	Jumlah kerusakan lingkungan	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
	Bencana alam akibat pengelolaan SDA	Jumlah bencana alam akibat pengelolaan SDA	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
	Sosialisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	cukup jelas	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	Kawasan pusat pertumbuhan kecamatan	Primer	BPMPD/K
	Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	Kawasan pusat pertumbuhan kecamatan	Primer	Dinas Perindag; Dinas koperasi; Dinas Budparpora
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Primer	Bappeda
	Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam proses pembangunan	Primer	BPMPD/K
	Kapasitas Aparatur Desa	Persentase kecukupan jumlah aparatur desa	Primer	BPMPD/K
	Kapasitas perempuan dalam pembangunan desa	Persentase perempuan dalam pembangunan desa	Primer	BPPKB
	Kawasan Kota Mandiri Terpadu	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT				
1. Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau serta berkualitas	Jumlah Puskesmas	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Jumlah Puskesmas Pembantu	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Rasio obat terhadap standar kebutuhan	Primer	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Primer	Dinas Kesehatan
	Angka Usia Harapan Hidup	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan
2. Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap	Jumlah Dokter	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Jumlah Bidan	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Jumlah Perawat	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah
	Jumlah Dokter per Puskesmas	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Rasio penduduk dengan Bidan	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Rasio penduduk dengan Perawat	Cukup Jelas	Primer	Dinas Kesehatan
3. Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.	Indeks pembangunan Manusia	Cukup Jelas	Sekunder	Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Primer	Dinas Kesehatan
4. Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak	cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 3,5%	Persentase PUS yang istri dibawah 20 tahun terhadap jumlah PUS	Primer	BPPKB
	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 65%	Persentase PUS peserta KB terhadap jumlah PUS	Primer	BPPKB
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5%	Persentase PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi terhadap jumlah PUS yang ber-KB	Primer	BPPKB
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70%	Persentase anggota Bina Keluarga Balita ber- KB	Primer	BPPKB
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	cukup jelas	Primer	BPPKB
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Cakupan kunjungan bayi	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan nifas	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Cakupan desa siaga aktif	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	RTS-Miskin	Jumlah RTS-Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Sekunder	Dinas Kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	Sekunder	Dinas Kesehatan
	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	Persentase prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	cukup jelas	Primer	Dinas Kesehatan
	advokasi perlindungan perempuan dan anak	Jumlah perlindungan perempuan dan anak yang telah dilaksanakan	Primer	BPPKB
MISI VI : MEMFASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT				
1. Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.	Pemahaman para pihak terhadap objek sengketa menjadi jelas	Jumlah penyelesaian kasus sengketa lahan secara persuasif	Primer	Sekda, BPN
	Persentase konflik lahan masyarakat	Cukup jelas	Primer	Sekda, BPN
	Advokasi pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa lahan	Jumlah penyelesaian kasus sengketa lahan secara persuasif		
2. Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.	Tatacara penyelesaian sengketa lahan	Peraturan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan kearifan lokal	Primer	Sekda, BPN

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI VII : MENINGKATKAN PENATAAN ZONASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN KONSERVASI, PENINGGALAN BUDAYA SITUS DAN PENGEMBANGAN BUDAYA				
1. Terciptanya kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.	Sistem informasi kawasan konservasi peninggalan situs, dan pengembangan budaya tertata dengan baik.	Adanya sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional	Primer	Kantor LH, Dinas hutbun, Bappeda
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Primer	Dinas Budparpora
	Pengamanan Kawasan Konservasi	Cukup jelas	Primer	Dinas Hutbun, BKSDA TNB, Polres.
	Jelasnya zonasi	Dokumen RTRW yang mengatur zonasi kawasan konservasi	Primer	Bappeda, Dinas Hutbun, Sekda, BKSDA TNB, Kantor LH
	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase peruntukan lahan terhadap RTRW	Primer	Bappeda, Dinas Hutbun, Sekda, BKSDA TNB, Kantor LH
	Luas wilayah produktif (Ribu Ha)	Cukup jelas	Primer	Bappeda
	Luas wilayah industri (Ribu Ha)	Cukup jelas	Primer	Bappeda
	Luas wilayah kebakaran (Ribu Ha)	Cukup jelas	Primer	Bappeda
	Luas wilayah perkotaan (Ribu Ha)	Cukup jelas	Primer	Bappeda
2. Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.	Partisipasi masyarakat untuk kepedulian atas perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Jumlah kegiatan kepedulian dan pelestarian lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat	Primer	Kantor Dampak Lingkungan Hidup
3. Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup.	Pelestarian hutan dan lahan	Keberlanjutan pelestarian hutan dan lahan	Primer	Sekda, Dinas Hutbun
	Masyarakat peduli lingkungan	Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi	Primer	Sekda, Dinas Hutbun
	Pelanggar hukum	Persentase pelanggaran hukum	Primer	Kantor LH, Dinas Hutbun dan DKP
MISI VIII : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA YANG DINAMIS SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN DEMOKRATIS				
1. Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	Jumlah korban jiwa akibat bencana yang terjadi berkurang	Primer	Dinas Sosnakertrans, Badan Kesbanglimas
	Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	Jumlah masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	Primer	Badan Kesbangpolinmas, Sekda
2. Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah	Dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan	Ketentraman dan kerukunan umat beragama	Primer	Sekda
3. Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku	Cakupan kajian seni 50%	Persentase kajian seni	Sekunder	Dinas Budparpora
	Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah (grup)	Cukup jelas	Primer	Dinas Budparpora
	Gedung Kesenian dan budaya (unit)	Cukup jelas	Primer	Dinas Budparpora
	Event seni dan budaya (event)	Cukup jelas	Primer	Dinas Budparpora
4. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial	Meningkatnya peran organisasi masyarakat secara konstruktif	Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Primer	Badan Kesbangpolinmas, Sekda
	Jumlah organisasi pemuda	Cukup jelas	Primer	Dinas Budparpora
	Jumlah kegiatan kepemudaan	Cukup jelas	Primer	Dinas Budparpora
	Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat	Cukup jelas	Primer	BPPKB
5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara demokratis	Persentase meningkatnya iklim demokrasi	Primer	Badan Kesbangpolinmas
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Primer	Badan Kesbangpolinmas
	Kegiatan pembinaan politik daerah	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Primer	Badan Kesbangpolinmas
	Jumlah demo	Cukup jelas	Primer	Badan Kesbangpolinmas, Sekda
	Jumlah LSM	Cukup jelas	Primer	Badan Kesbangpolinmas
6. Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jenis dan jumlah Kegiatan bantuan	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
	Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
	Jumlah lansia yang dilayani	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
	Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
	menurunnya angka anak terlantar pertahun	Persentase menurunnya angka anak terlantar pertahun	Primer	Dinas Sosnakertrans
	para penyandang cacat di seluruh kecamatan	Persentase para penyandang cacat di seluruh kecamatan	Primer	Dinas Sosnakertrans
	Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih keterampilan berusaha	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
	Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
	Persentase Penurunan eks penyandang penyakit sosial di tempat yang terindikasi penyebaran	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans
	Persentase Perlindungan dan pembinaan Anak Terlantar (Jumlah anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina)	Cukup jelas	Primer	Dinas Sosnakertrans

SASARAN STRATEGI KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI IX : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DISETIAP KECAMATAN DAN PEMBINAAN ATLET UNTUK BERPRESTASI					
1.	Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.	Persentase kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga di setiap kecamatan secara merata 75%	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
		Lapangan Olahraga	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
		Jumlah Sarana Olahraga	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
2.	Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan	Atlet Berprestasi terbina sejak usia dini	Jumlah atlet berprestasi terbina	Primer	Dinas Budparpora
		Jumlah kegiatan olahraga	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
		Jumlah organisasi olahraga	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
		Jumlah Club Olahraga	Cukup Jelas	Primer	Dinas Budparpora
3.	Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.	Tersedianya anggaran untuk pembinaan atlet berprestasi	Besaran anggaran yang dialokasikan	Primer	Dinas Budparpora
4.	Pengembangan dan pendidikan pemuda/i Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional	Persentase peningkatan prestasi qori dan qori'ah sebesar 50%	Cukup Jelas	Primer	Sekda

2011	8779
2012	9300
	5.934617